

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Indonesia menjadi salah satu negara yang memegang tingkat kepadatan penduduk yang terbilang tinggi. Menurut laporan dari *World Population Review* 2023, Indonesia menduduki peringkat keempat di dunia pada kategori penduduk terbesar dengan jumlah penduduk mencapai 277,4 juta orang. Kondisi kepadatan tersebut menghadapkan Indonesia pada permasalahan-permasalahan terkait kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, Indonesia juga dikategorikan sebagai negara berkembang, dimana kemiskinan masih sangat melekat. Kemiskinan merupakan masalah global dimana setiap negara mengalaminya serta menjadi salah satu permasalahan utama yang menarik untuk dikaji berulang-ulang.

Secara umum, kemiskinan digambarkan sebagai situasi dimana seseorang atau suatu keluarga tidak mampu mempertahankan serta mengembangkan kehidupan yang bermartabat, merupakan hak-hak dasar yang perlu dipenuhi. Menurut Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), kemiskinan merujuk pada situasi yang serba kekurangan dan bukan menjadi hak yang dikehendaki seseorang, melainkan suatu kondisi yang tidak dapat dihindari karena terbatasnya kekuatan yang mereka miliki. Hal ini juga dipengaruhi faktor-faktor, antara lain, situasi alamiah dan kondisi ekonomi, kondisi struktural dan sosial, dan kondisi kultural.

Adapun sejumlah faktor yang menjadi pemicu kemiskinan, antara lain, rendahnya tingkat penghasilan dan sumber daya produktif untuk menjamin

kehidupan yang berkelanjutan, masih ditemuinya kelaparan hingga kekurangan gizi, kualitas kesehatan yang rendah, akses masyarakat terhadap pendidikan dan layanan pokok lainnya terbatas dan sulit dijangkau, banyak masyarakat yang hidup bergelandang akibat hunian yang tidak memadai, serta lingkungan yang tidak aman, adanya diskriminasi dan keterasingan sosial. Masyarakat miskin sering dipandang sebagai masyarakat yang minim pengetahuan akan kesehatan. Suatu keluarga dianggap miskin apabila mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sehari-hari (Nadilla et al., 2022).

Pada tahun 2017, *World Bank* mengubah batas garis kemiskinan dengan basis perhitungan yang mengacu pada prioritas daya beli atau dikenal dengan istilah PPP. PPP sendiri merupakan data utama yang digunakan untuk mengonversi berbagai mata uang menjadi satu unit umum yang dapat dibandingkan dan memperhitungkan perbedaan harga antar negara. Oleh karena itu, terjadi perbedaan yang cukup tinggi antara ketentuan garis kemiskinan yang ditetapkan BPS dengan yang ditetapkan oleh Bank Dunia. Garis kemiskinan menurut BPS yaitu sebesar Rp 505.469/kapita/bulan, sedangkan menurut *World Bank* sebesar Rp 984.369/kapita/bulan. Hal tersebut menyebabkan 67 juta warga Indonesia masuk dalam golongan miskin berdasarkan standar baru Bank Dunia. Angka ini menyebabkan kenaikan sebesar 13 juta jiwa dan Indonesia masuk dalam 100 besar negara miskin di Dunia dengan menempati peringkat ke-73.

Dalam mencapai tujuan penurunan angka kemiskinan, berbagai upaya dan program pemerintah telah dilakukan untuk memperkuat kembali struktur ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya yang dimaksud yaitu Program

Keluarga Harapan atau yang disingkat PKH. PKH merupakan program bantuan tunai dari pemerintah untuk keluarga miskin atau yang disebut sebagai Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Pelaksanaan PKH diatur secara jelas pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

Masyarakat yang terpilih menjadi KPM PKH memiliki kewajiban, antara lain, memeriksakan kandungan secara rutin bagi ibu hamil sesuai ketentuan pelayanan kesehatan dasar, menjalankan pemeriksaan pasca persalinan bagi ibu nifas, mengantarkan anak-anak mereka ke fasilitas kesehatan, serta mendaftarkan dan menyekolahkan anak-anak mereka untuk memenuhi wajib belajar 12 tahun. Tingkat kehadiran anak di fasilitas pendidikan juga diperhatikan yaitu minimal 85% kehadiran. Selain memiliki kewajiban, adapun hak yang mereka dapatkan, antara lain, bantuan sosial, pendampingan, pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, serta memperoleh program bantuan komplementer seperti subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan kebutuhan dasar lainnya.

PKH telah dirumuskan sejak tahun 2007. PKH merupakan program yang prakteknya dijalankan oleh masing-masing pemerintah daerah secara berkelanjutan / *multiyear*. Munculnya program tersebut terinspirasi dari konsep CCT (*Conditional Cash Transfers*) yang telah berhasil diterapkan di banyak negara. Negara yang menerapkan konsep CCT terbukti berhasil menanggulangi masalah kemiskinan. Program PKH bermaksud untuk membentuk kualitas sumber daya manusia yang lebih unggul, memperbaiki perilaku masyarakat untuk

mewujudkan kesejahteraan, memutus rantai kemiskinan, serta meningkatkan kesehatan, pendidikan, dan akses layanan dasar (kesehatan dan pendidikan). Pemerintah berharap dengan adanya Program Keluarga Harapan Indonesia dapat bebas dari kemiskinan melalui pembaruan generasi muda serta kelompok non produktif (lansia) yang lebih terjamin.

PKH memiliki tujuan yang tercantum pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Pasal 2, yaitu sebagai berikut:

1. Menaikkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
2. Menekan berat pengeluaran dan menaikkan penghasilan keluarga miskin dan rentan
3. Menghasilkan perubahan perilaku dan kebebasan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam mengakses fasilitas kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial
4. Menekan kemiskinan dan ketimpangan; dan
5. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

Misi dan tujuan umum yang akan dicapai Program Keluarga Harapan yaitu angka kemiskinan dan kesenjangan menurun, serta mewujudkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan gambaran kualitas hidup manusia atau tingkat kesejahteraan masyarakat. Nilai IPM Kota Semarang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Nilai IPM Kota Semarang

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nilai	82,01	82,72	83,19	83,05	83,55	84,08

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Pada Tabel 1.1 menunjukkan nilai IPM Kota Semarang tahun 2017-2022 yang mengalami kenaikan setiap tahunnya. Tahun 2017 nilai IPM Kota Semarang mencapai 82,01 dan terus meningkat hingga Tahun 2022 mencapai 84,08. Semakin tinggi Indeks Pembangunan Manusia suatu wilayah, maka semakin berhasil pembangunannya dan semakin tinggi kualitas penduduknya. Nilai IPM mengukur keberhasilan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui tiga aspek fundamental yaitu umur panjang dan kesehatan, pengetahuan, serta taraf hidup yang layak, Kota Semarang merupakan bagian dari kota di Jawa Tengah yang memiliki taraf hidup manusia yang berkualitas. Terlepas dari tingginya kualitas taraf hidup masyarakat Kota Semarang, permasalahan kemiskinan perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah. Berikut ini adalah data terkait jumlah penduduk miskin di Kota Semarang.

Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Kota Semarang 2015-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Pada Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa terjadi penyusutan jumlah penduduk miskin selama tujuh tahun terakhir, khususnya pada tahun 2018 dengan selisih sebesar 7,21 ribu jiwa. Pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin berjumlah 80,86 ribu jiwa, sedangkan pada tahun 2018 berjumlah 73,65 ribu jiwa. Dari tahun ke tahun, secara garis besar jumlah penduduk miskin di Kota Semarang mengalami penurunan. Meskipun demikian, angka kemiskinan di Semarang masih dapat dikatakan tinggi. Pada tahun 2020 terjadi kenaikan sebesar 7,71 ribu jiwa dan pada tahun 2021 terjadi kenaikan sebesar 4,77 ribu jiwa. Hal ini disebabkan salah satunya karena munculnya pandemi covid-19 yang memberikan dampak yang sangat terasa tidak hanya sektor ekonomi tetapi hampir semua sektor. Tingginya jumlah kemiskinan sangat terlihat khususnya di Kecamatan Semarang Utara. Berikut ini adalah data persentase penduduk miskin per Kecamatan.

Gambar 1.2 Persentase Penduduk Miskin Kota Semarang



Sumber : Dinas Sosial Kota Semarang, 2020

Berdasarkan Gambar 1.2 diketahui bahwa Kecamatan Semarang Utara menjadi kecamatan yang memperoleh angka kemiskinan tertinggi di Kota Semarang. Pada tahun 2020, Kecamatan Semarang Utara menempati posisi

pertama kecamatan termiskin di Kota Semarang dengan persentase penduduk miskin sebesar 10%. Sedangkan Kecamatan Tugu memiliki penduduk miskin terendah yaitu sebesar 1,5%. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa terdapat ketimpangan jumlah persentase penduduk miskin antar kecamatan di Kota Semarang.

Samuelson dan Nordhaus berpendapat bahwa terdapat dua hal utama yang menjadi penyebab munculnya penduduk miskin khususnya pada negara dengan pendapatan rendah, yaitu rendahnya kualitas kesehatan dan kurangnya perbaikan mutu pendidikan (Islami & Anis, 2019). Di Kecamatan Semarang Utara, tingkat pendidikan masih tergolong rendah dibandingkan dengan rata-rata tingkat pendidikan di Kota Semarang. Hal tersebut dapat diamati dari Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APK dan APM tiap jenjang pendidikan di Kecamatan Semarang Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Kecamatan Semarang Utara Tahun 2017

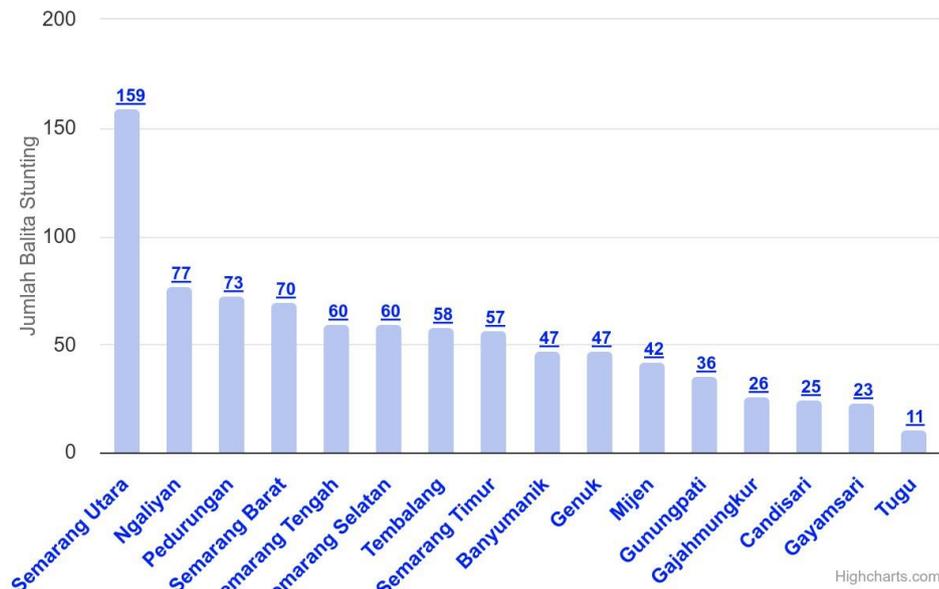
Jenjang Pendidikan	APK		APM	
	Kec. Semarang Utara	Rata-Rata Kota Semarang	Kec. Semarang Utara	Rata-Rata Kota Semarang
SD dan sederajat	67,74	112,53	60,07	98,2
SMP dan sederajat	30,43	118,18	21,82	86,15
SMA dan sederajat	59,72	131,88	34,28	92,09

Sumber: satudata.semarangkota.go.id, 2023

Tabel 1.2 menunjukkan perbandingan antara APK dan APM di Kecamatan Semarang Utara dengan Rata-rata di Kota Semarang. Nilai APK dan APM di Kecamatan Semarang Utara memiliki selisih yang cukup banyak dengan rata-rata

di Kota Semarang. Nilai ideal dari APM adalah 100%. Pada tabel di atas terlihat bahwa APK dan APM di Kecamatan Semarang Utara jauh berada di bawah angka 100% terutama pada jenjang Pendidikan SMP dan SMA sederajat.

Gambar 1.3 Jumlah Kasus Stunting Per Kecamatan di Kota Semarang Tahun 2023
Kasus Stunting Per Kecamatan

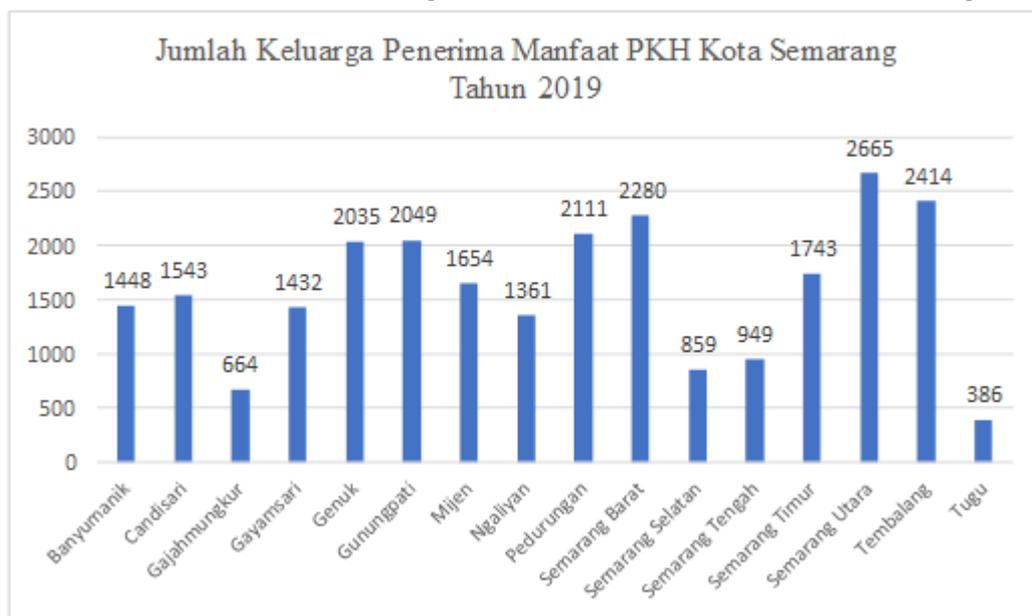


Sumber: Dinas Kesehatan, 2023

Gambar 1.3 di atas adalah data balita stunting tahun 2023 per kecamatan di Kota Semarang. Kecamatan Semarang Utara menempati peringkat tertinggi di Kota Semarang dengan jumlah mencapai 159 kasus bayi stunting pada tahun 2023. Sedangkan kasus stunting terendah berada di Kecamatan Tugu yaitu 11 kasus. Terdapat selisih yang cukup signifikan antara kasus stunting di Kecamatan Semarang Utara dengan kecamatan lain. Permasalahan stunting atau permasalahan gizi lainnya dikarenakan kurangnya konsumsi gizi serta adanya infeksi atau penyakit. Konsumsi gizi yang tidak terpenuhi salah satunya disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi.

Program Keluarga Harapan telah dilaksanakan di seluruh kecamatan di Kota Semarang sejak September 2013. Namun, tingkat Pendidikan dan kesehatan di Kecamatan Semarang Utara tergolong masih rendah, padahal penerima bantuan PKH paling banyak berada di Kecamatan Semarang Utara. Data jumlah KPM PKH adalah sebagai berikut:

Gambar 1.4 Jumlah Keluarga Penerima Manfaat PKH Kota Semarang

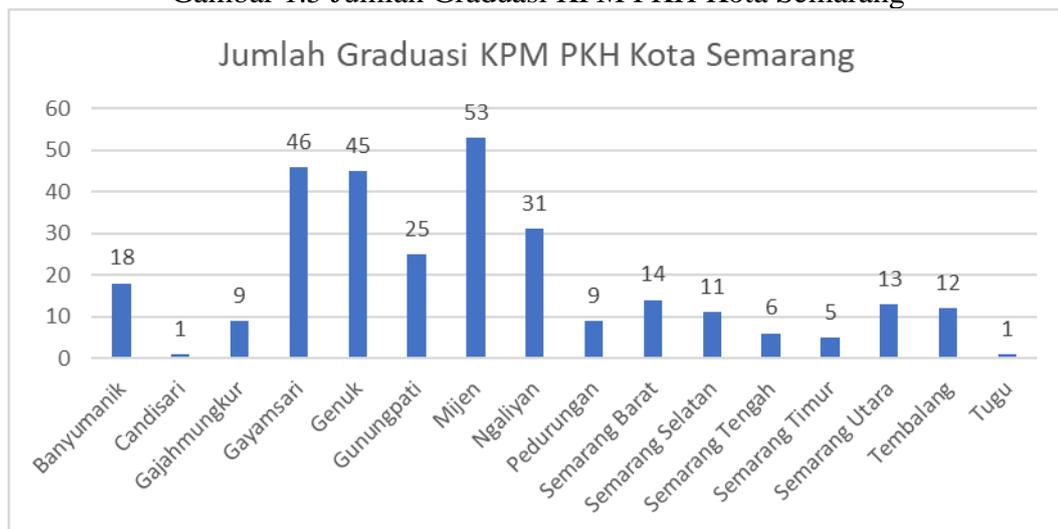


Sumber : Diolah dari data Bappeda Kota Semarang 2019

Gambar 1.4 menunjukkan data terkait jumlah penerima PKH di Kota Semarang pada tahun 2019. Kecamatan Semarang Utara memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi, sehingga angka keluarga penerima manfaat juga menduduki posisi tertinggi, yaitu sebanyak 2.665 KK. Peringkat kedua terdapat Kecamatan Tembalang yaitu sebanyak 2.414 KK. Banyaknya bantuan yang diterima di kecamatan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat dalam meringankan beban mereka dan dapat segera keluar dari status kemiskinan. Bantuan yang diberikan tidak semata berupa uang tetapi juga terdapat

pendampingan yang diterima KPM PKH untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka agar lebih produktif serta terjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Keberhasilan tujuan tersebut salah satunya ditandai dengan adanya proses graduasi. Namun, jumlah graduasi di kecamatan tersebut masih sangat rendah. Adapun jumlah keluarga yang telah mengalami graduasi adalah sebagai berikut:

Gambar 1.5 Jumlah Graduasi KPM PKH Kota Semarang



Sumber : Diolah dari data Dinas Sosial Kota Semarang 2017-2019

Bersumber pada Gambar 1.5 dapat diketahui bahwa Kecamatan Semarang Utara mendapatkan jumlah graduasi sebanyak 13 KK. Angka tersebut dapat dikatakan rendah dan tidak sebanding dengan jumlah keluarga penerima manfaat di kecamatan tersebut. Angka graduasi tertinggi berada pada Kecamatan Mijen dengan jumlah 53 KK. Angka graduasi menandakan berakhirnya kepesertaan keluarga sebagai penerima manfaat PKH. Graduasi PKH artinya keluarga tidak lagi memiliki status selaku penerima manfaat PKH atau KPM PKH karena dianggap telah mampu dan mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

Pada umumnya, proses graduasi dipengaruhi oleh adanya dorongan yang diberikan pendamping sosial kepada KPM PKH untuk melakukan kegiatan produktif. Kegiatan produktif tersebut dilakukan agar KPM PKH memperoleh pendapatan tambahan dengan mengimplementasikan keterampilan yang mereka dapatkan dari proses pendampingan. Namun yang banyak terjadi adalah KPM PKH lebih memilih menggantungkan hidupnya pada bantuan yang mereka dapatkan. “di Kecamatan Semarang Utara masih belum banyak warga yang melakukan graduasi mandiri dan menggantungkan PKH sebagai penghasilan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masih banyak masyarakat yang enggan untuk melepas bantuan PKH walaupun seharusnya ada beberapa dari mereka yang sudah bisa mandiri dengan usaha-usaha yang dilakukan” (Sari & Marom, 2020 :10).

Selain itu, terdapat beberapa permasalahan dalam implementasi PKH, seperti kurangnya sinkronisasi yang dilakukan antara pendamping sosial dengan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan data sasaran PKH. Hal tersebut berakibat pada kurang meratanya pemberian bantuan PKH. “Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan masyarakat kurang mampu yang belum mendapatkan bantuan PKH. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pendataan yang dilakukan” (Sari & Marom, 2020:9). Terdapat sebanyak 39% persentase tingkat dana PKH yang belum tersalurkan di Kecamatan Semarang Utara (Yolanita & Yuniningsih, 2020). Berikut adalah salah satu aduan dari masyarakat yang dituliskan pada media sosial Instagram PKH Kota Semarang.

Gambar 1.6 Aduan Masyarakat



lestaribugi Saya tgl 20.1.2014 sampai tgl 2.4.2023 belum terdaftar sebagai penerima manfaat bansos PKH padahal kehidupan saya orang miskin dan sudah masuk daftar DTKS.



33 ming Balas

Sumber : *Instagram @pkh_kotasemarang*

Pada Gambar 1.6 menunjukkan salah satu aduan dari masyarakat yang mengatakan bahwa mereka belum mendapatkan bantuan PKH meskipun telah terdaftar pada DTKS terhitung sejak tahun 2014 hingga 2023. Pada dasarnya, masyarakat penerima PKH tidak hanya mereka yang terdaftar pada DTKS, tetapi juga harus memenuhi salah satu komponen PKH (pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial). Hal tersebut menunjukkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap PKH. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pendamping sosial kurang memberikan edukasi dan sosialisasi untuk mengenalkan Program Keluarga Harapan.

Ditemukan pula bahwa tingkat kesadaran belum sepenuhnya baik. Di bidang pendidikan, masih banyak masyarakat yang sulit untuk diminta bersekolah sehingga harus diingatkan terus-menerus oleh pendamping sosial. Sedangkan di bidang kesehatan, ibu-ibu hamil sudah mulai sadar pentingnya memeriksakan kehamilannya ke posyandu (Sari & Marom, 2020).

Selain itu, terdapat penerima PKH yang tidak menggunakan bantuan sesuai dengan alokasi bantuan atau penyalahgunaan bantuan PKH. Masih ditemukan KPM PKH yang menggunakan bantuan untuk membeli pulsa, jalan-jalan bahkan untuk mempercantik diri yang tidak sesuai dengan aturan PKH (Nurul & Lestari, 2019). Terdapat KPM PKH di Kelurahan Kebonharjo Kecamatan Semarang Utara

yang telah mendapatkan bantuan PKH selama 3 tahun dan menggunakan uang tersebut untuk membeli motor honda beat baru. Pernyataan tersebut dikutip dari salah satu aduan pada platform “LaporGub!” Kota Semarang 2021. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya pengawasan akan penggunaan dana bantuan yang kemudian akan berdampak ada ketidaktercapaian program PKH (Lubis & Zubaidah, 2020)

Sebagian masalah PKH yang telah dijabarkan sebelumnya berkaitan dengan tugas dan peran pendamping sosial PKH. Pendamping sosial PKH merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah yang secara resmi ditetapkan Kementerian Sosial RI untuk melakukan pendampingan di tingkat kecamatan. Pendamping sosial PKH dipilih melalui proses seleksi dan dengan kualifikasi tertentu. Adanya pendamping tersebut juga menjadi penghubung antara masyarakat dengan berbagai instansi terkait sehingga dalam menjalankan tugasnya mereka diminta untuk memadukan beragam kepentingan yang muncul dari kepentingan pemerintah dan masyarakat (Habibullah, 2011). Pendamping sosial PKH bertanggung jawab dari awal persiapan program, pelaksanaan program hingga pengawasan program.

Berdasarkan Keputusan Menteri No.592/SK/PM.PPKPAN.2/12/2017, tugas pendamping sosial adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi pada pelaksanaan verifikasi dan validasi data penerima bantuan;
2. Melakukan koordinasi untuk memberikan edukasi dan sosialisasi terkait pelaksanaan program bantuan;

3. Melakukan koordinasi terkait registrasi masyarakat penerima bantuan;
4. Melakukan koordinasi dan pengawasan pada kegiatan penyaluran bantuan; dan
5. Melaporkan pelaksanaan program bantuan kepada Dinas Sosial Kabupaten/ Kota dan Kementerian Sosial.

Berdasarkan pasal 49 Permensos RI No 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, pendamping sosial berperan pada beberapa kegiatan meliputi kegiatan promosi, mediasi, dan advokasi. Pada awal persiapan program, pendamping bertugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum ditingkat kecamatan untuk mengenalkan Program PKH. Setelah mendapatkan data penerima PKH, pendamping mengadakan pertemuan awal dengan keluarga penerima PKH. Kemudian, diadakan pembentukan kelompok yang berisi 15-30 KPM PKH sekaligus menentukan ketua per kelompok. Pendamping sosial PKH juga menjalankan pendampingan pada saat KPM PKH melakukan kunjungan untuk pertama kali ke fasilitas pelayanan kesehatan sekitar (posyandu dan puskesmas) dan kunjungan ke sekolah yang akan menerima anggota keluarga PKH. Pendamping sosial PKH juga memiliki tugas dalam mencatat semua aspek kegiatan PKH dan melaporkan rencana beserta realisasi kegiatan tersebut kepada UPPKH Kab/Kota setiap bulan. Selain itu, pendamping sosial PKH juga ikut terlibat dalam proses penyaluran bantuan

Pendamping sosial PKH juga memiliki tugas rutin, antara lain, pemutakhiran data peserta PKH; memverifikasi pelaksanaan kewajiban peserta PKH; memberikan fasilitas dan penyelesaian aduan; melakukan kunjungan ke

rumah peserta PKH yang tidak menghadiri pertemuan rutin atau yang tidak menjalankan komitmennya sebagai peserta PKH selama tiga bulan; serta mengadakan koordinasi dengan aparat setempat, fasilitator layanan kesehatan dan pendidikan. Dalam pertemuan rutin bulanan antara pendamping dengan peserta PKH, diisi dengan sosialisasi, menggali keluhan atau informasi dari peserta, pemberian motivasi, wawasan, pengetahuan, dan keterampilan kepada peserta, menyampaikan evaluasi program yang berjalan, dan menggerakkan peserta PKH untuk melakukan tindakan produktif agar mereka mendapatkan nilai tambah di masyarakat dan menghasilkan pendapatan tambahan (Kementerian Sosial, 2015). Dilihat dari uraian tugas tersebut, keberhasilan pelaksanaan Program Keluarga Harapan dapat didukung dengan memaksimalkan peran dari pendamping.

Pendamping sosial PKH menjadi salah satu aktor kunci keberhasilan pencapaian tujuan PKH. Pengentasan kemiskinan melalui PKH secara tidak langsung bergantung pada peran pendamping sosial PKH (Purwanti, 2022). Pada pelaksanaan PKH di salah satu kecamatan di Kota Magelang, peran pendamping sebagai fasilitator dapat mendukung masyarakat untuk memiliki kemampuan dalam membuka usaha sendiri dan mengurangi perilaku konsumtif melalui pemberian motivasi, serta pelatihan kepada KPM PKH. Pendamping sosial PKH juga melakukan perannya sebagai mediator terhadap permasalahan yang dihadapi KPM PKH dengan mempertemukan pihak yang berkaitan untuk kemudian mencari jalan keluar atas permasalahan. Pendamping juga memiliki peran teknis yang berkaitan dengan pengumpulan dan analisis data. Peran ini diperlukan untuk

menghindari terjadinya error dan kesalahan penyaluran bantuan, sehingga sasaran program ini tepat dan sesuai.

Pada Program Keluarga Harapan, terdapat pertemuan secara berkala yang diberi nama Peningkatan Kemampuan Keluarga atau yang dikenal dengan istilah P2K2 yang dilaksanakan oleh pendamping kepada KPM PKH sebagai salah satu bentuk peran pendamping sebagai pendidik. Peran pendidik melalui kegiatan P2K2 mampu meningkatkan ilmu pengetahuan dan kesadaran peserta PKH akan pentingnya kesehatan dan pendidikan serta menggali potensi pada diri masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup anggota keluarganya di masa depan (Lestari, 2019). Peran pendamping sebagai perwakilan dapat dilihat pada saat pendamping berkoordinasi dengan pemerintah terkait kapan bantuan akan disalurkan (Supriyanti & Nasir, 2023). Koordinasi juga dilakukan bersama lembaga eksternal, dimana pendamping melakukan tugasnya dengan mengatasnamakan masyarakat yang mereka dampingi. Masyarakat dibantu untuk mendapatkan haknya, salah satunya yaitu terkait dengan bantuan yang terkadang terlambat cair (Purwanti, 2022).

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, dapat dilihat bahwa pendamping sosial berperan penting dalam keberhasilan Program Keluarga Harapan. Pernyataan tersebut didukung oleh hasil penelitian oleh Septiani, Nuralisa, dan Halim yang menemukan bahwa diperoleh peran yang signifikan pada pendamping sosial PKH dalam mendukung kemandirian dan kesejahteraan keluarga (Septiani et al., 2019). Keterampilan pendamping, seperti keterampilan sebagai fasilitator, educator, perwakilan, dan keterampilan teknis memiliki dampak yang signifikan

terhadap keberhasilan PKH. Proses pendampingan yang dilakukan mampu menumbuhkan pola pikir mandiri pada masyarakat sehingga mereka dapat lebih produktif dan berdaya dalam mencapai kesejahteraan ekonomi dan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada bantuan pemerintah dalam mencukupi kehidupannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Pendamping Sosial dalam Program Keluarga Harapan di Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang”.

1.2. Identifikasi Masalah

1. Kurangnya sinkronisasi yang dilakukan antara pendamping sosial dengan pihak-pihak terkait dalam hal pengelolaan data sasaran PKH.
2. Terdapat 39% dana PKH yang belum tersalurkan di Kecamatan Semarang Utara.
3. Banyak masyarakat yang menggantungkan PKH sebagai penghasilan dan enggan untuk melepas bantuan PKH walaupun seharusnya mereka sudah mampu hidup mandiri.
4. Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat sehingga sulit diminta untuk bersekolah.
5. Tidak sedikit KPM PKH yang menyalahgunakan dana bantuan untuk berfoya-foya dan tidak sesuai dengan aturan.

1.3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran pendamping sosial dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang?

2. Apa faktor pendorong dan faktor penghambat peran pendamping sosial dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis peran pendamping sosial dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang.
2. Menganalisis faktor pendorong dan faktor penghambat peran pendamping sosial dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang.

1.5. Kegunaan Penelitian

1.5.1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian yang akan dilakukan adalah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai teori manajemen publik beserta implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Teori manajemen publik ini berfokus pada peran stakeholders atau dalam hal ini peran pendamping pada suatu implementasi kebijakan atau program sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut. Adanya penelitian ini diharapkan dapat memperkaya temuan tentang dampak dari peran pendamping sosial dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan atau program serta berguna bagi perkembangan ilmu Administrasi Publik.

1.5.2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dilakukan dengan harapan peneliti dapat menggunakan dan mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan wawasan yang didapatkan dari

aktivitas pembelajaran selama periode perkuliahan. Selain itu, peneliti dapat lebih memahami tentang ilmu yang dipelajari selama perkuliahan.

b. Bagi Universitas

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat menambah koleksi penelitian terkait peran pendamping dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya terutama pada ilmu Administrasi Publik.

c. Bagi Dinas Sosial dan Pendamping Sosial

Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat menggambarkan lebih jelas mengenai peran dan kewajiban pendamping sosial terutama pada Program Keluarga Harapan (PKH) yang berjalan di Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang. Peneliti juga berharap bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk meningkatkan keterampilan dan peran pendamping sosial serta meningkatkan efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) terutama di Kota Semarang.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dilakukan dengan harapan bahwa masyarakat dapat memperoleh wawasan tambahan mengenai peran pendamping sosial pada suatu program khususnya pada Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang.

1.6.Kajian Pustaka

1.6.1. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu

No	Penulis/ Tahun/ Judul	Tujuan Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1	Sofianto, A.	Menganalisis	<i>Mixed</i>	Implementasi PKH di Jawa

	(2020). “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Jawa Tengah.”	implementasi PKH di Jawa Tengah.	<i>method</i>	Tengah sudah baik yang dapat dilihat dari dimensi metode dan administratif. Namun, terdapat kekurangan pada tujuan program yang tidak tepat. Dari sisi masyarakat, mereka telah menerima dampak adanya PKH berupa keringanan beban hidup.
2	Septiani, D.,dkk. (2019). “ <i>The Companion Role of The Family Hope Program In Assisting The Independence and Family Welfare.</i> ”	Mendeskripsikan peran pendamping pada PKH di Kelurahan Kota Karang	Deskriptif kuantitatif	Pendamping memiliki keterkaitan yang signifikan terhadap kemandirian masyarakat dalam rangka menuju kesejahteraan. Pada pelaksanaan PKH, ditemukan beberapa peran pendamping yang kurang optimal mengakibatkan rendahnya sikap dan perilaku mandiri KPM PKH serta tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan yang diwajibkan sebagai peserta PKH.
3	Hasna, N. M.,dkk. (2019). “Analisis dampak pemberian bantuan (pkh) terhadap kesejahteraan masyarakat.”	Menganalisis dampak dari pemberian bantuan KPM kepada masyarakat serta pelaksanaan pelatihan FDS bagi peserta PKH.	Deskriptif kualitatif	Manfaat adanya bantuan PKH telah dirasakan masyarakat di Desa Karanganyar, seperti pengurangan beban biaya pendidikan, kualitas kesehatan meningkat dan terjaga tanpa dipungut biaya, serta kondisi ekonomi yang membaik. Namun, pelatihan yang dilakukan kurang optimal. Terdapat dampak yaitu memunculkan kecemburuan sosial pada masyarakat yang tidak memperoleh bantuan.
4	Nurwan, T.	Menganalisis	Kuantitatif	Keterampilan pendamping

	W., & Hasan, H. (2020). "Keberhasilan PKH ditinjau dalam kaitannya dengan Keterampilan Pendamping dan Partisipasi KPM: Studi di Sijunjung Sumatera Barat."	keberhasilan pelaksanaan PKH di Nagari Pematang Panjang, pengaruh keterampilan pendamping dalam kegiatan P2K2, dan partisipasi peserta PKH.		dan partisipasi peserta memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan pelaksanaan PKH. Masih terdapat keterampilan yang kurang yaitu pemberian dukungan. Sedangkan partisipasi peserta paling banyak hanya terlibat dalam pengambilan manfaat dibandingkan pada saat pelaksanaan program. Secara keseluruhan pelaksanaan PKH di daerah tersebut dapat dikatakan berhasil karena terjadi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan.
5	Suswanto, B., dkk (2019). "Peran Pendamping Desa dalam Model Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan"	Menganalisis peran pendamping desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat di Desa Pasuruhan Binangan Cilacap	Kualitatif	Pendamping desa memegang peran yang amat berguna dalam manajemen administrasi, keuangan pengembangan desa, dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam melakukan pendampingan, mereka perlu berkoordinasi dan bekerja sama dalam rangka menemukan masalah, potensi, dan prospek dalam pengembangan desa.
6	Damayanti, P. (2021). "Peran Pendamping Sosial dalam Proses Graduasi Program	Menganalisis bagaimana proses graduasi dan peran pendamping sosial selama mendampingi	Kualitatif	Terdapat 3 tahap graduasi PKH, antara lain, graduasi mandiri, graduasi alamiah, dan graduasi melalui pembaharuan data. Tingkat graduasi dapat menunjukkan keefektifan pendampingan yang dilaksanakan oleh

	Keluarga Harapan (PKH) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020.”	KPM-PKH.		pendamping sosial PKH. Selain itu, program pemerintah tersebut juga berhasil meningkatkan perekonomian.
7	Abubakar, dkk (2022). <i>“The Review On The Role Of Social Companion In The Implementation Of Family Hope Program (PKH) In Darul Falah District, East Aceh During The Covid-19 Pandemic.”</i>	Menganalisis implementasi PKH dan menggambarkan peran pendamping pada program tersebut di masa pandemic yang dilaksanakan di Kecamatan Darul Falah Kabupaten Aceh Timur	kualitatif	Pendamping menjalankan perannya secara aktif pada masa pandemic melalui berbagai kegiatan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Pendamping sosial melakukan koordinasi bersama Muspika Kecamatan Darul Falah mengenai berbagai hal yang dilakukan di desa binaan, seperti sosialisasi, pertemuan kelompok, P2K2, dan penyaluran bantuan. Pendamping dan Muspika berperan penting dalam mendukung pelaksanaan program PKH, dimana didalamnya terdapat faktor kerjasama dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
8	Nadilla, H. F., dkk. (2022). “Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Anak Stunting Pada Keluarga	Menganalisis bagaimana peran pendamping dalam menyelesaikan permasalahan stunting dan bagaimana pengaruh peran	Deskriptif kualitatif	Secara umum dapat disimpulkan bahwa peran pendamping melalui keterampilan yang mereka miliki pengaruh dalam mencapai keberhasilan menanggulangi masalah stunting. Upaya tersebut dilakukan pendamping melalui pertemuan rutin bersama peserta PKH dengan memberikan materi terkait

	Penerima Manfaat.”	pendamping di Kabupaten Tapin		stunting secara langsung. Selain itu, pendamping juga melakukan kerjasama dengan pihak kesehatan untuk mengoptimalkan upaya dalam penanggulangan stunting.
9	Nandini, R., dkk. (2022). “Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Resolusi Konflik Sosial Di Desa Genteng Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang.”	Menganalisis peran pendamping PKH dalam menyelesaikan konflik yang terjadi pada antar peserta PKH di Desa Genteng	Deskriptif kualitatif	Pelaksanaan PKH di Desa Genteng terdapat beberapa hambatan. Salah satunya yaitu adanya kecemburuan sosial antara penerima bantuan dan yang tidak menerima bantuan. Dalam menghadapi permasalahan tersebut, pendamping menggunakan cara mediasi dengan memposisikan diri sebagai pihak ketiga yang netral. Selain itu, pendamping juga menjalankan perannya sebagai fasilitator yang komunikator yang baik guna meminimalisir terjadinya konflik sosial lainnya.
10	Iswanto, D. (2023). “ <i>The Role of Social Workers in Empowering Poor Village Communities (Study of Indonesian Conditional Cash Transfer Programme (PKH) Facilitators in Jegulo Village,</i>	Menganalisis peran pendamping dalam melakukan pemberdayaan masyarakat penerima PKH di Kabupaten Tuban	Deskriptif kualitatif	Peran yang dilakukan oleh pendamping ditinjau berdasarkan Permensos No 1 Tahun 2018 tentang PKH. Sebagai mediator pendamping telah mampu menyelesaikan konflik yang terjadi yaitu terkait keluarga yang tidak menerima bantuan PKH. Sebagai advokator, pendamping mampu membantu terpenuhinya kebutuhan penyandang disabilitas. Sedangkan sebagai fasilitator, pendamping belum

	<i>Tuban Regency).</i> ”			memberikan pelatihan keterampilan kepada peserta PKH terkait berwirausaha. Oleh karena itu, pemberdayaan hanya mampu meningkatkan bidang kesehatan dan Pendidikan saja.
--	--------------------------	--	--	---

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk mengetahui perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian yang sudah dibuat sebelumnya oleh peneliti lain yang berkaitan dengan permasalahan yang relevan dengan penelitian ini. Adapun tujuan dari upaya ini yaitu untuk melihat persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan yang sebelumnya serta dapat dijadikan referensi untuk memperkaya bahan kajian.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan serta perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Bagian yang sama antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah terletak pada fokus dimana sama-sama meneliti mengenai peran pendamping khususnya pada salah satu program pemerintah yaitu PKH. Beberapa penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian yang serupa yaitu deskriptif kualitatif. Namun, penelitian ini merupakan penelitian terbaru karena terdapat perbedaan pada lokus dengan penelitian sebelumnya. Peneliti mengambil lokasi di Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang. Belum ada penelitian sebelumnya yang dilakukan pada lokasi yang sama dengan penelitian ini. Selain itu, peneliti juga meneliti terkait peran pendamping sosial pada pelaksanaan

Program Keluarga Harapan secara keseluruhan serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pendamping PKH dalam menjalankan perannya.

1.6.2. Administrasi Publik

Administrasi dalam arti sempit merupakan kegiatan ketatausahaan pengendalian informasi, sedangkan dalam arti luas merupakan kegiatan kerjasama antar manusia untuk mencapai tujuan secara bersamaan, beraturan, dan memiliki arah berdasarkan tugasnya masing-masing yang telah dibagi sesuai kesepakatan (Banga, 2018). Administrasi memiliki tiga tingkat fungsi, secara berurutan yaitu fungsi kepemimpinan, fungsi manajemen organisasi, dan fungsi pengawasan. Masing-masing fungsinya memiliki keterkaitan yang berbeda dalam organisasi, mulai dari perencanaan, pemeliharaan bisnis rutin, dan sumber daya manusia. Sedangkan istilah publik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti orang banyak yang datang atau umum. Publik tidak hanya merujuk pada masyarakat luas, tetapi juga merujuk pada lembaga pemerintah yang merupakan orang yang bekerja untuk kepentingan masyarakat luas.

Terdapat persepsi yang berbeda dalam mendefinisikan administrasi publik. Chandler dan Plano (1988) mengatakan bahwa administrasi publik “adalah proses dimana sumber daya dan personel public diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik” (Keban, 2019:3). Administrasi publik berkaitan dengan aspek organisasi, aspek sumber daya manusia, dan keuangan dimana terjadi perbaikan dan penyempurnaan dengan tujuan untuk memecahkan permasalahan publik. McCurdy memiliki pandangan yaitu administrasi publik

sebagai proses politik yang merupakan metode dalam menjalankan pemerintahan atau melakukan fungsi negara dengan cara yang prinsipil (Keban, 2019).

Administrasi publik secara lebih spesifik dapat dinyatakan sebagai apa yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya lembaga eksekutif dalam menyelesaikan masalah publik (Ahmad, 2015). Menurut Kettl, istilah administrasi publik lebih populer disebut sebagai birokrasi dari pada administrasi publik itu sendiri karena lebih mudah diamati dan dipahami secara nyata oleh orang awam (Keban, 2019). Variasi arti istilah administrasi publik juga dapat diamati dari persepsi orang yang mengartikan administrasi publik sebagai “administration of public”, “administration for public”, dan “administration by public”. Persepsi-persepsi tersebut memiliki perbedaan pada bagaimana peran pemerintah dan orientasinya pada masyarakat.

Berdasarkan tinjauan literatur menggambarkan bahwa belum ada kesepakatan tentang batasan dan definisi dari administrasi publik. Hal ini dikarenakan administrasi memiliki cakupan yang cukup kompleks bergantung pada dinamika masalah yang dihadapi masyarakat. dari berbagai pengertian yang dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan sebuah disiplin ilmu yang dilakukan melalui kerjasama sekelompok orang dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Administrasi publik berkaitan dengan formulasi kebijakan, permasalahan publik, serta peran eksekutif dalam lingkup publik. Penelitian ini membutuhkan teori administrasi publik karena berkaitan dengan permasalahan publik yaitu kemiskinan yang berusaha diatasi dengan mengimplementasikan kebijakan berupa Program Keluarga Harapan, serta

di dalamnya terdapat peran stakeholders dimana dalam penelitian ini yaitu pendamping sosial.

1.6.3. Paradigma Administrasi Publik

Dari waktu ke waktu, disiplin ilmu terus mengalami perubahan dan pengembangan, dan disertai pergeseran paradigma yang merupakan cara pandang, nilai, prinsip utama, dan metode penyelesaian masalah yang menjadi pedoman bagi sekelompok orang pada periode waktu tertentu. Suatu paradigma akan hilang dan terganti apabila mendapat pertentangan atau kritik dan mengalami krisis atau anomalies dan digantikan dengan cara pandang baru atau paradigma baru yang dapat diterima. Anomalies ini juga terjadi beberapa kali pada perkembangan ilmu administrasi publik, sehingga hingga saat ini lahir enam paradigma administrasi publik, yaitu antara lain (Keban, 2019):

- a. Paradigma 1 yaitu “Dikotomi Politik dan Administrasi” yang dikenalkan oleh Frank J. Goodnow dan Leonard D. White pada tahun 1900-1926. Pandangan ini memisahkan antara politik dengan administrasi yang digambarkan adanya lembaga terpisah dalam menjalankan pemerintahan. Lembaga yang dimaksud yaitu badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Badan legislatif bertugas mengekspresikan kehendak rakyat yang kemudian diimplementasikan oleh badan eksekutif, sedangkan badan yudikatif bertugas membantu badan legislatif dalam merumuskan dan menetapkan tujuan dan kebijakan. Antara politik dan administrasi memiliki fokus perhatian yang berbeda. Politik memiliki fokus perhatian pada ekspresi dan kehendak rakyat. Ekspresi dan kehendak tersebut

kemudian dilaksanakan dalam suatu kebijakan yang menjadi fokus perhatian dari administrasi. Tujuan dari dipisahkannya politik dan administrasi adalah agar pelaksanaan kebijakan terlepas dari keterkaitan dengan unsur apapun, sehingga dapat mencapai birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien. Paradigma ini lebih menekankan pada lokus daripada fokus atau metode yang tidak dijelaskan secara menyeluruh.

- b. Paradigma 2 yaitu “Prinsip-Prinsip Administrasi” yang dikenalkan oleh Willoughby, Gullick, dan Urwick pada tahun 1926-1937. Paradigma ini mengenalkan prinsip-prinsip administrasi sebagai fokus dari administrasi publik dan muncul karena dipengaruhi oleh kritik yang disampaikan tokoh manajemen klasik. Prinsip yang dikenal dengan istilah POSDCORB tersebut terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penyediaan staf, pembuatan keputusan, pelaporan, koordinasi, dan penganggaran. Menurut mereka, prinsip ini bersifat universal, artinya dapat diterapkan dimana saja. Hal tersebut menimbulkan perdebatan terkait penempatan lokus, sehingga pada paradigma ini lebih menekankan fokusnya.
- c. Paradigma 3 yaitu “Administrasi Negara Sebagai Ilmu Politik” yang dikenalkan pada tahun 1950-1970 oleh John Gaus sebagai kritik dari kedua paradigma sebelumnya. Paradigma pertama mendapat kritik dari Morstein-Marx yang mengatakan bahwa sangat tidak realistis dan tidak mungkin jika politik dan administrasi mengalami pemisahan. Paradigma kedua mendapat kritik dari Herbert Simon yang mengatakan bahwa

prinsip administrasi tidak bersifat universal dan terjadi ketidakkonsistenan prinsip tersebut. Ia berpendapat bahwa administrasi negara dipengaruhi oleh nilai tertentu, sehingga *value-laden politics* lebih relevan daripada *value free administration*. Prinsip-prinsip administrasi yang sebelumnya merupakan fokus kini menjadi kabur karena memiliki banyak kekurangan. Paradigma ini mengatakan bahwa teori administrasi publik merupakan bagian dari teori politik dengan lokus pada birokrasi pemerintahan. Selama periode ini, ilmu politik mendominasi dunia administrasi publik dan berakibat pada krisis identitas administrasi publik.

- d. Paradigma 4 yaitu “Administrasi Publik Sebagai Ilmu Administrasi” yang dikenalkan tahun 1956-1970. Paradigma ini menekankan pada prinsip manajemen yang sebelumnya telah populer dan dikembangkan lebih mendalam secara ilmiah. Paradigma ini memiliki dua orientasi yaitu ilmu administrasi murni dan kebijakan publik. Fokus paradigma berada pada karakter organisasi, membedah manajemen, dan implementasi teknologi terbaru, sedangkan lokusnya tidak tampak karena dapat diterapkan di dunia bisnis dan dunia administrasi publik. Hal ini menjadikan administrasi kehilangan identitas kembali karena hanya dipandang sebagai manajemen secara luas.
- e. Paradigma 5 yaitu “Administrasi Publik Sebagai Administrasi Publik” yang dikenalkan pada tahun 1970 dan masih relevan hingga saat ini. Pada paradigma ini, terdapat upaya untuk menegakkan kembali disiplin ilmu

administrasi publik sebagai bidang studi mandiri dengan fokus dan lokus yang telah ditetapkan. Fokus paradigma ini menggabungkan beberapa teori yaitu teori organisasi, manajemen, dan kebijakan publik. Lokusnya berada pada masalah dan kepentingan publik.

f. Paradigma 6 yaitu “*Governance*” yang dikenalkan pada tahun 1990 dan masih relevan hingga sekarang. Paradigma *governance* diartikan sebagai penerapan kekuasaan atau dominasi dari pemerintah dalam rangka mewujudkan cita-cita negara yaitu menciptakan kesejahteraan kepada masyarakat. Terdapat keterlibatan pihak swasta dalam pelayanan publik yang tidak hanya bertujuan untuk menciptakan efisiensi dan membatasi kekuasaan pemerintah, tetapi juga untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Paradigma ini memiliki fokus pada peran dan jaringan aktor baik pemerintah maupun di luar pemerintah dalam menghasilkan barang dan jasa publik.

Berdasarkan beberapa paradigma di atas, penelitian ini berada pada paradigma terakhir yaitu paradigma tata kelola atau *governance*. Penelitian berpusat pada peran pendamping sosial dalam program PKH untuk mencapai efektivitas dan keberhasilan program pemerintah, dimana didalamnya juga membutuhkan partisipasi masyarakat.

1.6.4. Manajemen Publik

Manajemen merupakan salah satu diantara enam dimensi strategis dalam administrasi publik. Dimensi ini berkaitan dengan bagaimana mengimplementasikan prinsip-prinsip manajemen dalam pelaksanaan kebijakan

publik agar berjalan secara efektif dan efisien. Mary Parker Follett (1924), mengemukakan bahwa “manajemen sebagai suatu proses pencapaian hasil melalui orang lain” (Keban, 2019:107). Dalam deskripsi tersebut terdapat beberapa unsur penting yaitu cara kerjasama, sumber daya manusia sebagai subjek, dan berpedoman pada prinsip-prinsip tertentu.

Manajemen publik merupakan salah satu konsep yang digunakan untuk membahas dan memperdalam pendekatan manajerial dalam administrasi publik. Menurut Overman, manajemen publik yang dikenal juga dengan manajemen instansi pemerintah bukan merupakan administrasi publik baru, bukan sebuah *policy analysis*, dan bukan pula *scientific management* (Keban, 2019).

Menurut Lynn (1996), manajemen publik dapat digambarkan sebagai tiga hal, yaitu sebagai seni, ilmu, dan profesi (Wijaya & Danar, 2014). Manajemen publik sebagai seni artinya suatu kegiatan yang tidak dapat dipelajari dengan cara dihitung karena membutuhkan tingkat kreativitas dan fleksibilitas tinggi yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Manajemen publik sebagai ilmu artinya membutuhkan pengkajian yang sistematis melalui penafsiran dan penjabaran. Terakhir, sebagai profesi artinya manajemen publik merupakan sebuah ilmu yang didedikasikan oleh sekumpulan orang.

Menurut Nor Ghofur, manajemen publik merupakan manajemen pemerintahan dimana diperuntukkan melakukan prinsip-prinsip manajemen terhadap pelayanan kepada masyarakat (Sudarmanto et al., 2020). Manajemen publik mempelajari bagaimana manusia menerapkan prinsip-prinsip manajemen di dalam organisasi sektor publik. Manajemen publik adalah cara kerja birokrasi

yang dapat menggambarkan bentuk-bentuk birokrasi. Manajemen publik juga mengalami pergeseran paradigma, yaitu sebagai berikut:

a. *Old Public Administration (OPA)*

Dalam paradigma ini, pelaksanaan program publik dilakukan secara hierarkis dengan pengawasan pemimpin yang ketat. Fokus utamanya yaitu bagaimana menyediakan kebutuhan publik melalui organisasi resmi pemerintah. Dalam hal ini, administrator public memiliki peran dalam merumuskan kebijakan namun hanya terbatas dan hanya memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pelayanan yang dilakukan oleh organisasi juga bersifat tertutup sehingga membatasi keterlibatan masyarakat. Dasar teori yang digunakan dalam paradigma ini adalah teori politik. Aturan hukum merupakan wujud kepentingan publik yang diekspresikan secara politis. Pelayanan publik tersebut kemudian dipertanggungjawabkan kepada pejabat publik dan dengan diskresi terbatas. Pada paradigma ini, pemerintah cenderung kaku dan sentralistik.

b. *New Public Management (NPM)*

Memasuki abad ke 21, terjadi beberapa perubahan fundamental di lingkungan administrasi publik, seperti perubahan teknologi dan meningkatnya arus globalisasi. “Munculnya perubahan fundamental ini pada satu sisi telah membangkitkan ketidakpuasan terhadap aneka bentuk praktek pelayanan publik, baik secara kuantitatif maupun kualitatif” (Mindarti, 2016:138). Oleh karena itu, untuk merespon ketidakpuasan dan memenuhi tuntutan perubahan, maka muncul paradigma baru yaitu *New*

Public Management. Berbeda dengan paradigma OPA, dimana pemerintahan bersifat kaku dan sentralistik, pada paradigma NPM lebih bersifat desentralisasi dan memiliki spirit entrepreneur. Inti dari paradigma NPM yaitu upaya melanjutkan keberlangsungan pemerintahan dengan prinsip organisasi privat yang berorientasi pada profit. Dalam hal ini, pemerintah berperan sebagai katalisator. Orientasi pemerintah beralih dari klien dan konstituen menuju orientasi kepada pelanggan dan pasar. Dasar teori yang digunakan yaitu teori ekonomi sehingga menciptakan pemerintahan yang kompetitif dalam pelayanan publik.

c. *New Public Service* (NPS)

Pendekatan NPM yang berorientasi pada profit mendapatkan kritikan yang kemudian menghadirkan teori baru yaitu *New Public Service* (NPS). Pada paradigma ini terjadi perubahan yaitu dengan mengedepankan nilai posisi warga negara. Oleh karena itu, Pembangunan institusi publik mengacu pada integritas dan responsivitas. Teori yang berlaku dalam paradigma ini adalah teori demokrasi yang berorientasi kepada warga negara. Adapun prinsip-prinsip yang diterapkan NPS menurut Dendhardt, yaitu:

1. Melayani publik yang berorientasi pada masyarakat bukan pelanggan;
2. Mengutamakan kepentingan umum;
3. Mengedepankan nilai kemasyarakatan dibanding nilai *entrepreneur*;
4. Berpikir strategis dan demokratis dalam bertindak;
5. Sadar peran penting akuntabilitas;
6. Cenderung melayani daripada mengarahkan;

7. Memperhatikan *value people* dibandingkan produktivitas.

Berdasarkan pendekatan-pendekatan diatas, penelitian ini berada pada pendekatan *New Public Service* (NPS). Program Keluarga Harapan merupakan kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan. Selain itu, dalam pelaksanaan program nilai kemasyarakatan lebih dikedepankan dibandingkan nilai kewirausahaan.

1.6.5. Peran Pendamping Sosial

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan peranan sebagai sebuah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu kejadian atau peristiwa. Menurut definisi Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek yang kedudukannya atau statusnya tidak tetap (dinamis), dimana seseorang dikatakan melakukan peranan apabila telah menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan yang telah ditetapkan (Lumowa et al., 2021). Menurut Riyadi, pengertian peran yaitu, orientasi dan konsep yang menjadi bagian dari pilihan sosial suatu pihak (Tatangindatu et al., 2022). Melalui peran, baik perorangan maupun organisasi, berbuat searah dengan harapan pribadi atau lingkungannya.

Secara terminology, peran adalah seperangkat harapan berupa perilaku yang ada pada seseorang yang menyanggah kedudukan di masyarakat. Kegiatan atau tindakan yang dilakukan dalam suatu peristiwa oleh seseorang disebut dengan peranan (Syamsir, 2014). Dari beberapa pengertian terkait peran, dapat disimpulkan bahwa peran adalah tingkah laku individu maupun organisasi atau bagaimana mereka dalam bersikap dan bertindak sesuai dengan harapan suatu organisasi atau sistem tertentu berdasarkan kedudukan, kewajiban, serta haknya.

Menurut Jim Ife dan Frank Tesoriero, peran dikelompokkan menjadi 4 golongan. Masing-masing peran tersebut terdiri dari sejumlah peran spesifik dan keterampilan apa yang dibutuhkan untuk mengisi peran tersebut. Keempat peran tersebut setidaknya menjadi hal pokok yang harus dimiliki seorang pendamping untuk memberdayakan sasarannya, yaitu sebagai berikut (Ife & Tesoriero, 2016):

1. Peran fasilitatif (*facilitative roles*);
2. Peran mendidik (*educational roles*);
3. Peran representasi (*representational roles*); dan
4. Peran teknis (*technical roles*).

Peran fasilitatif merupakan peran yang berkenaan dengan pemberian stimulasi dan penopang pengembangan masyarakat. Peran ini meliputi, semangat sosial atau animasi sosial, mediasi dan negosiasi, dukungan, membangun konsensus, fasilitasi kelompok, pemanfaatan berbagai keterampilan dan sumber daya, mengorganisasi, dan komunikasi pribadi. Adanya keterampilan peran fasilitatif diharapkan pendamping dapat melakukan pendampingan dengan sebaik mungkin, sehingga meminimalkan terjadinya permasalahan dalam implementasi PKH terutama antar KPM PKH.

- a. Semangat sosial atau animasi sosial, merupakan kemampuan menginspirasi, mengantusias, mengaktivasi, menstimulasi, menggerakkan, memotivasi orang lain untuk melakukan tindakan. Dalam melakukan tugasnya, pendamping tidak melakukan semuanya sendiri, tetapi lebih mengarah pada menciptakan keterlibatan orang lain dalam sejumlah proses masyarakat.

- b. Mediasi dan negosiasi, merupakan peran pendamping dalam menghadapi suatu konflik antar dua pihak yang berselisih yang dapat terjadi karena perbedaan kepentingan dan nilai di dalam masyarakat. Saat terjadi konflik, pendamping melakukan mediasi dan dituntut untuk bersikap netral yaitu dengan tidak memihak pihak manapun. Namun, dalam beberapa kasus, kenetralan tersebut tidak memberikan sebuah penyelesaian sehingga pendamping perlu menjadi negosiator dan melakukan negosiasi. Artinya, pendamping mewakili salah satu pihak dalam konflik untuk membantu mencari jalan keluar dengan mempertimbangkan berbagai pandangan yang ada.
- c. Memberikan dukungan, seperti, mengafirmasi penduduk, mengenali dan mengakui nilai dan kontribusi masyarakat, memberikan dorongan, menyediakan diri untuk menjadi tempat apabila masyarakat ingin berbicara, bertanya, maupun melakukan diskusi, serta memberikan dukungan dengan memberikan pujian kepada masyarakat. Dukungan yang diberikan terus menerus akan menjadikan pendamping sebagai aktor yang bisa diandalkan sehingga berdampak pada keberhasilan program.
- d. Membangun konsensus, merupakan perluasan dari peran mediator. Pendamping menjawab konflik melalui pendekatan kesepakatan dan kerjasama yang dapat diterima oleh banyak orang. Adanya konsensus tidak berarti semua orang sepakat terhadap semua hal, tetapi mewakili persetujuan dengan memperhatikan dan menghormati perbedaan

pandangan. Dalam membangun konsensus, keterampilan yang dibutuhkan oleh pendamping yaitu keterampilan mendengarkan, berempati, dan berkomunikasi.

- e. Fasilitasi kelompok, merupakan kemampuan untuk memimpin atau mengkoordinasikan sebuah diskusi, mengoperasikan kelompok kecil, hingga mengembangkan masyarakat melalui kelompok yang berjalan baik dan efektif.
- f. Pemanfaatan berbagai keterampilan dan sumber daya, yaitu melakukan identifikasi dan memanfaatkan keterampilan dan sumber daya karena terdapat banyak potensi yang tidak disadari dimiliki oleh masyarakat. Potensi tersebut dapat dilihat dari keuangan, keahlian, bahan-bahan mentah, dan produksi barang yang dilakukan masyarakat. Identifikasi dan pemanfaatan dilakukan untuk merangsang masyarakat agar lebih produktif dan berdaya sehingga dapat mengembangkan ekonomi masyarakat.
- g. Mengorganisasi, dimana pendamping berperan sebagai pengatur yang memastikan segala hal dapat berjalan dengan baik dan benar. Melalui pengorganisasian, pemberdayaan menjadi lebih efektif dan mampu meningkatkan kesadaran kerja masyarakat.
- h. Komunikasi pribadi. Dalam kesehariannya, pendamping selalu berinteraksi dengan penduduk dan pihak lainnya yang beragam. Oleh karena itu, pendamping harus mampu berkomunikasi secara efektif.

Peran mendidik berkaitan dengan pemberian ilmu baru, keterampilan, dan pengalaman yang dimiliki pendamping yang kemudian dibagikan kepada masyarakat atau kelompok sasaran. Mengajar dan belajar adalah sebuah proses dua arah, dan seorang pendamping dapat belajar dari proses sebanyak yang ia sumbangkan pada proses tersebut. Beberapa bentuk peran mendidik, antara lain:

- a. Peningkatan kesadaran, yaitu memberikan pemahaman terhadap berbagai struktur dan strategi transformasi sosial, sehingga orang-orang dapat terlibat dan mengambil kegiatan yang lebih efektif. Tindakan tersebut berorientasi pada kemandirian yang perlu dicapai.
- b. Memberikan informasi tentang program. Apabila pendamping salah dalam memberikan informasi kepada kelompok sasaran tentang apa yang sedang terjadi dalam masyarakat mereka sendiri maka dapat menimbulkan kesenjangan.
- c. Pelatihan, artinya pendamping melakukan pengajaran kepada kelompok sasaran untuk melakukan sesuatu. Pelatihan akan lebih efektif apabila dapat merespon permintaan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Pelatihan tidak hanya dapat dilakukan oleh pendamping itu sendiri, tetapi mereka juga dapat mencari seseorang sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan. Seseorang yang memberikan pelatihan dapat berasal dari luar maupun dari dalam kelompok sasaran.

Peran representasi ialah berinteraksi dengan pihak luar untuk memberikan manfaat kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan mereka. Beberapa bentuk peran ini antara lain:

- a. Mendapatkan sumber daya, artinya pendamping membantu memperoleh apa yang masyarakat butuhkan dari sumber yang telah tersedia. Kebutuhan yang dimaksud dapat berupa kebutuhan akan informasi, sumber dana dan sebagainya. Pendamping tidak diharuskan mengetahui segala informasi atau memiliki banyak dana, tetapi pendamping mengetahui bagaimana atau kemana harus pergi untuk menemukan informasi dan dana yang diperlukan.
- b. Advokasi yaitu mewakili berbagai kepentingan dalam sebuah masyarakat untuk menangani permasalahan mereka dengan lebih baik. Advokasi mengharuskan adanya keterampilan untuk mendengarkan dan memahami masyarakat, serta mempresentasikan kasus yang dihadapi kelompok sasarannya di forum lain.
- c. Menggunakan media. Pendamping dapat secara efektif memanfaatkan media untuk melakukan aksi kampanye (selain politik) atau mempublikasikan proses masyarakat, kegiatan pertemuan, maupun suatu peristiwa.
- d. Humas dan presentasi publik. Pendamping melakukan penyebaran kegiatan agar orang lain mengetahuinya dan kemudian ikut terlibat serta dapat memberikan dukungan pada kegiatan yang dilakukan pendamping bersama kelompok sasaran. Dalam kehumasan dibutuhkan kreativitas dan imajinasi untuk mendapatkan minat publik. Pendamping juga membuat berbagai presentasi publik yang berisi fakta yang

dijabarkan secara jelas dengan menggunakan metode penyampaian yang menarik.

- e. Jaringan kerja, yaitu membangun ikatan dengan beragam orang, sehingga dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan perubahan.
- f. Berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada sesamanya. Pendamping akan menyampaikan berbagai gagasan tentang apa yang dilakukan dan tidak dilakukan, berbagi hasil penelitian terstruktur atau evaluasi program, dan berbagai perspektif teoritis mengenai pengembangan masyarakat.

Peran teknis merupakan peran yang berkaitan dengan pengembangan kelompok sasaran melalui mengaplikasikan keterampilan teknis. Bentuk kegiatan pada peran ini antara lain:

- a. Penelitian, merupakan kemampuan dalam menghimpun data yang relevan untuk kemudian di analisis dan dipresentasikan.
- b. Menggunakan komputer. Penggunaan komputer sebagai bagian dari strategi dalam mengembangkan masyarakat.
- c. Presentasi verbal dan tertulis. Hal ini berkaitan dengan penulisan laporan, catatan, artikel, maupun surat menyurat, serta mempresentasikan sebuah materi.
- d. Manajemen. Pendamping sosial menempatkan posisinya dalam sebuah manajemen saat berkaitan dengan isu-isu seperti, melakukan penilaian anggota, membentuk sebuah kelompok yang efektif, membantu

menetapkan sebuah tujuan, memastikan adanya komunikasi yang baik antar anggota, dan mengurus berbagai konflik dan ketegangan.

- e. Pengaturan keuangan. Pendamping memiliki peran untuk memastikan bahwa pengaturan keuangan dapat berjalan semestinya, seperti dokumentasi data finansial yang memadai serta akuntabilitas kontrol biaya dan anggaran belanja.

1.6.6. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Peran Pendamping Sosial

Pada umumnya, dalam pelaksanaan sebuah program tidak terlepas dari hal-hal yang dapat mendukung keberhasilan kegiatan tersebut dan juga terdapat hal-hal yang dapat menghambat terlaksananya kegiatan. Begitu pula saat menjalankan peran baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi, tentu akan terdapat sejumlah faktor yang dapat memberikan dampak pada pelaksanaannya. Faktor pendorong peran merupakan faktor yang cenderung memberikan kemudahan dalam pencapaian peran baik individu, kelompok, maupun organisasi sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sedangkan faktor penghambat peran merupakan faktor yang menjadi kendala dalam menjalankan suatu peran sesuai dengan visi dan misinya.

Faktor pendorong peran menurut Horton & Hunt dalam (Ekarishanti & Kismartini, 2019) antara lain:

1. Kompetensi, merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan individu maupun organisasi dalam menjalankan perannya pada suatu kegiatan atau program dalam bentuk perilaku yang saling berkaitan. Kompetensi dibutuhkan untuk mengisi beberapa peran yang berbeda

pada waktu yang bersamaan. Kompetensi tersebut meliputi pengetahuan atau keterampilan, pengalaman, serta keahlian tertentu. Kompetensi juga dapat diartikan sebagai hal-hal yang membantu seseorang untuk melakukan tugasnya dengan baik.

2. Sosialisasi, adalah proses untuk menjadi bagian dari kelompok masyarakat dengan cara menelaah kultur dan tata kelakuan serta diikuti dengan adanya perubahan perilaku. Sebagian besar proses sosialisasi merupakan proses belajar untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan, nilai, serta norma yang berlaku di suatu masyarakat sehingga seseorang tersebut dapat masuk dan berpartisipasi di dalamnya. Sosialisasi meliputi penyampaian informasi yang dilakukan oleh pendamping serta bahasa yang digunakan dalam penyampaian informasi tersebut.
3. Perilaku peran, merupakan perilaku sesungguhnya dari seseorang yang sedang melakukan peran tertentu. Sedangkan peran sendiri adalah perilaku yang diharapkan dari seorang dalam status. Terdapat kemungkinan terjadi perbedaan antara perilaku peran seseorang dengan perilaku yang diharapkan dari aktor dalam peran tertentu karena beberapa alasan. Cara pandang dan sifat kepribadian seseorang akan mempengaruhi bagaimana seseorang merasakan peran.

Di samping faktor yang dapat mendorong keberhasilan peran, Adapun faktor penghambat peran yaitu sebagai berikut:

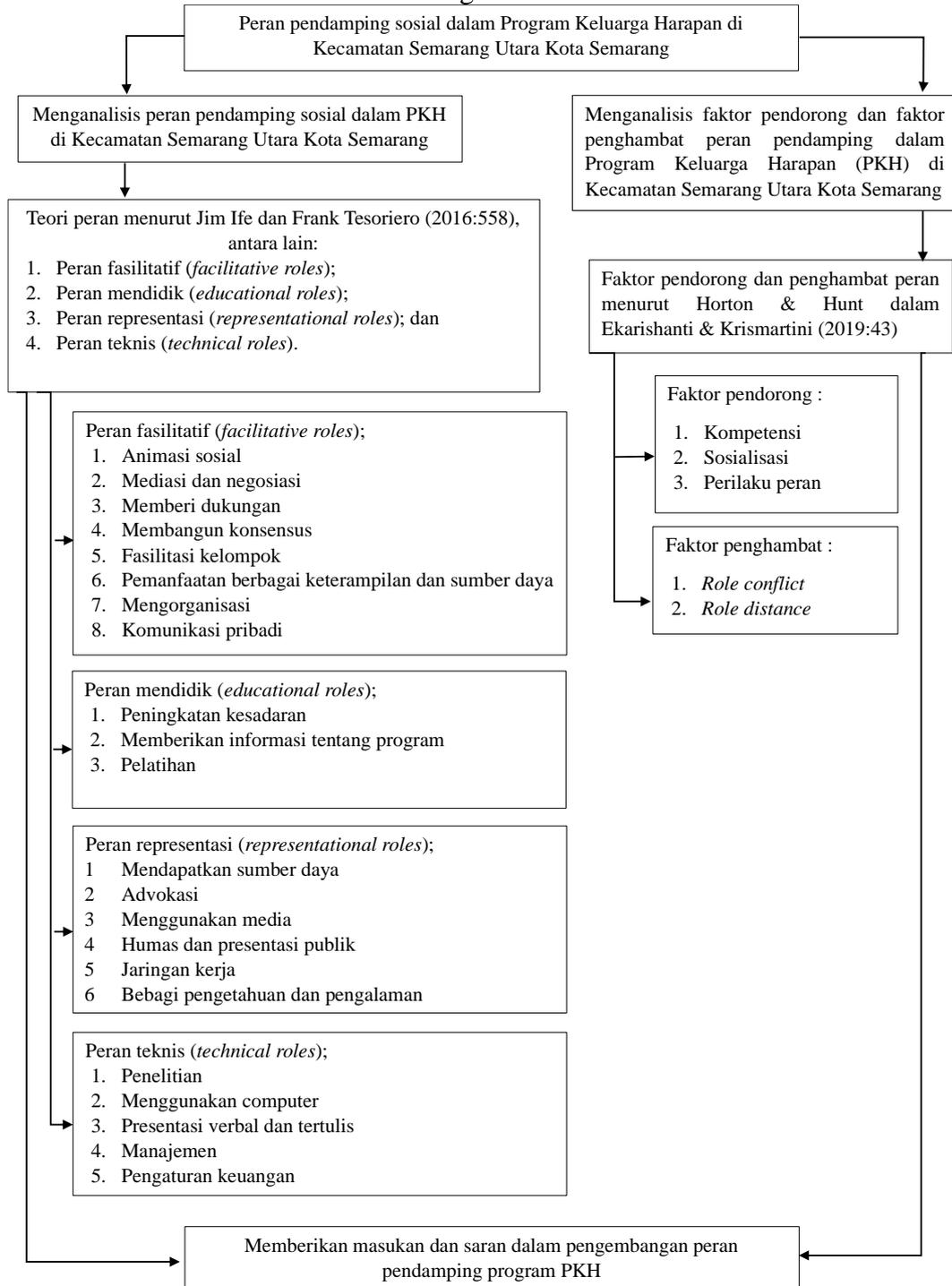
1. *Role conflict*, merupakan suatu kondisi pemegang peran akibat dua atau lebih ekspektasi peran yang terjadi secara bersamaan, sehingga sulit untuk memenuhi kedua peran tersebut secara bersamaan. Konflik peran terjadi ketika timbul pertentangan peran yang harus dilakukan oleh individu-individu yang tergabung dalam suatu organisasi. Hal ini menyulitkan individu yang mengalami konflik peran untuk mengambil keputusan yang baik tentang bagaimana memenuhi peran tersebut dengan baik.
2. *Role transition*, dimana terjadi perubahan dari satu peran ke peran yang lain yang berbeda dengan peran sebelumnya yang tidak dapat dihindari. Hal tersebut harus diimbangi dengan kesiapan seperti pengalaman dan adaptasi. Pengalaman belajar dari peran sebelumnya belum tentu dapat memenuhi sikap dan nilai-nilai yang dibutuhkan di dalam peran yang baru. *Role transition* ini dapat berupa perubahan posisi jabatan maupun kemampuan seseorang beradaptasi pada jabatan baru.
3. *Role distance*, merupakan kesenjangan peran yang terjadi karena ketidakcocokan yang dirasakan seseorang maupun kelompok dalam menjalankan perannya sehingga menimbulkan tekanan dan membebani perasaan. Istilah ini dikenalkan oleh Goffman yang menggambarkan bahwa terdapat perbedaan antara adanya harapan terkait kinerja peran dengan komitmen individu terhadap peran. *Role distance* juga terjadi apabila peran yang harus dijalankan seorang aktor itu tidak mendapatkan prioritas tinggi dalam hidupnya. Pemenuhan peran tersebut seringkali

disertai dengan ketegangan atau tekanan psikologis yang menetap hingga individu tersebut mengubah prioritasnya dan mampu meyakinkan dirinya sendiri bahwa perannya adalah positif. Faktor ini dapat dilihat dari pembagian peran yang bersifat adil antar pegawai serta beban kerja yang didapatkannya.

Pada penelitian ini menggunakan teori Horton & Hunt yaitu faktor pendorong meliputi kompetisi, sosialisasi, dan perilaku peran, sedangkan faktor penghambat meliputi *role conflict* dan *role distance*.

1.7. Kerangka Pemikiran Teoritis

Gambar 1.7 Kerangka Pemikiran Teoritis



1.8.Operasionalisasi Konsep

1.8.1.Peran Pendamping Sosial

Pendamping sosial merupakan salah satu aktor dalam Program Keluarga Harapan dimana perannya dapat mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai tujuan program. Penelitian ini akan mengetahui dan menggali informasi terkait peran pendamping sosial dalam Program Keluarga Harapan khususnya di Kecamatan Semarang Utara. Peran tersebut diukur melalui:

- a. Peran fasilitatif adalah peran yang berkaitan dengan memfasilitasi sarana dan prasarana serta pemberian stimulasi dan penunjang pengembangan kelompok sasaran.
- b. Peran mendidik adalah pemberian pengetahuan atau informasi serta keterampilan yang dimiliki pendamping kepada kelompok sasaran.
- c. Peran representasi adalah berinteraksi dengan pihak luar dengan mengatasmamakan kelompok sasaran dan membawa kepentingan mereka.
- d. Peran teknis adalah menerapkan pengetahuan dan kemampuan pendamping yang bersifat teknis dalam menjalankan tugasnya.

Tabel 1.4 Operasionalisasi Konsep Peran Pendamping Sosial

Faktor	Gejala	Sub Gejala	Informan				
			1	2	3	4	5
Peran pendamping sosial PKH di Kecamatan Semarang	Peran Fasilitatif	1. Semangat Sosial / Animasi sosial		√	√	√	√
		2. Mediasi dan negosiasi		√		√	√
		3. Memberi dukungan	√		√		√
		4. Membangun konsensus		√	√	√	
		5. Fasilitasi kelompok	√		√		√

Utara		6. Pemanfaatan berbagai keterampilan dan sumber daya	√	√	√	√	
		7. Mengorganisasi	√		√	√	
		8. Komunikasi pribadi	√			√	√
	Peran Mendidik	1. Peningkatan kesadaran	√		√	√	√
		2. Memberikan informasi tentang program	√		√		√
		3. Pelatihan			√	√	√
	Peran Representasi	1. Mendapatkan sumber daya	√	√	√		
		2. Advokasi	√		√		√
		3. Menggunakan media	√	√	√	√	
		4. Humas dan presentasi publik	√	√	√	√	
		5. Jaringan kerja	√	√	√	√	
		6. Berbagi pengetahuan dan pengalaman	√	√	√		
	Peran Teknis	1. Penelitian	√	√	√		
		2. Menggunakan computer	√		√	√	
		3. Presentasi verbal dan tertulis	√	√			√
		4. Manajemen	√		√	√	
		5. Pengaturan keuangan	√	√	√		√

Keterangan Informan:

- 1) Koordinator PKH Kota Semarang
- 2) Koordinator PKH Kecamatan Semarang Utara
- 3) Pendamping PKH Kecamatan Semarang Utara
- 4) Pegawai Kelurahan Bidang Kesejahteraan Sosial
- 5) KPM PKH

1.8.2. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Peran Pendamping Sosial

Faktor pendorong dalam penelitian ini adalah hal-hal yang mendukung jalannya peran individu sesuai dengan visi dan misi. Sedangkan peran penghambat dalam penelitian ini adalah hal-hal yang mengurangi ketercapaian peran yang dijalankan individu. Faktor pendorong tersebut dapat diukur melalui:

- a. Kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki pendamping dalam menjalankan perannya meliputi pengetahuan, pengalaman, dan Pendidikan pendamping.
- b. Sosialisasi yaitu proses pembelajaran untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan, nilai, maupun norma melalui penyampaian informasi dengan bahasa yang sesuai.
- c. Perilaku peran yaitu perilaku sesungguhnya yang mendorong pendamping untuk berperan sesuai dengan tuntutan peran.

Faktor penghambat dapat diukur melalui:

- a. *Role conflict* yaitu konflik yang terjadi pada suatu peran tunggal maupun antar berbagai peran.
- b. *Role distance* yaitu kesenjangan peran akibat ketidakcocokan saat menjalankan peran sehingga timbul tekanan maupun beban yang dirasakan pendamping.

Tabel 1.5 Operasionalisasi Konsep Peran

Faktor	Gejala	Sub Gejala	Informan				
			1	2	3	4	5
Faktor pendorong	Kompetensi	1. Pengetahuan pendamping	√	√	√		
		2. Pengalaman pendamping	√	√	√		

		3. Pendidikan pendamping	√	√	√		
	Sosialisasi	1. Penyampaian informasi oleh pendamping	√	√	√		√
		2. Bahasa yang digunakan dalam penyampaian informasi oleh pendamping	√		√		√
	Perilaku peran	1. Perilaku yang sesungguhnya dilakukan peran		√		√	√
		2. Cara pandang pendamping dalam menjalankan peran		√	√	√	
Faktor penghambat	<i>Role conflict</i>	1. Konflik peran yang terjadi pada pendamping		√	√	√	
		2. Penolakan terhadap program yang dilakukan pendamping		√	√	√	
	<i>Role distance</i>	1. Kesenjangan peran yang dirasakan pendamping	√	√	√		
		2. Beban kerja pendamping	√	√	√		

Keterangan Informan:

- 1) Koordinator PKH Kota Semarang
- 2) Koordinator PKH Kecamatan Semarang Utara
- 3) Pendamping PKH Kecamatan Semarang Utara
- 4) Perangkat daerah tingkat Kelurahan
- 5) KPM PKH

1.9. Argumen Penelitian

Argumen penelitian berisi jawaban atau rumusan masalah sesuai dengan teori-teori pada literatur dan dibuat berdasarkan kerangka pemikiran teoritis. Peneliti akan mengkaji dengan menggunakan teori peran dari Jim Ife dan Frank

Tesoriero (2016: 558-614), dimana terdapat empat aspek peran yang wajib dimiliki individu maupun kelompok dari organisasi antara lain: peran fasilitatif, peran mendidik, peran representasi, dan peran teknis. Penelitian ini akan menganalisis peran dari pendamping sosial PKH terutama di Kecamatan Semarang Utara. Pendamping sosial PKH merupakan salah satu aktor yang terlibat dalam implementasi PKH dan memiliki pengaruh dalam keberhasilan program. Namun, seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan program yang juga berkaitan dengan tugas serta peran pendamping. Dalam menjalankan perannya, terdapat faktor pendorong dan faktor penghambat peran. Peneliti mengkaji faktor tersebut dengan menggunakan teori dari Horton dan Hunt dalam (Ekarishanti & Krismartini, 2019 :43-46). Adapun faktor pendorong peran yaitu kompetensi, sosialisasi, dan perilaku peran. sedangkan faktor penghambat peran yaitu *role conflict* dan *role distance*

1.10. Metode Penelitian

1.10.1. Tipe Penelitian

Menurut Crewell, penelitian kualitatif bermakna mekanisme pendalaman dan memahami makna perilaku individu dan kelompok, mencerminkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan” (Sugiyono, 2023:4). Pada metode ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci yang menggali fakta-fakta yang ada di lapangan (Sugiyono, 2023). Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menyampaikan potret keadaan yang terjadi ketika penelitian berlangsung.

Penelitian tersebut menggambarkan, membuat sebuah catatan, melakukan analisis, dan menginterpretasikan ke dalam situasi saat ini (Pasolong, 2012).

Pada penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan metode penelitian kualitatif. Metode ini digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang lebih mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Data yang ditemukan yaitu berupa non angka, seperti, gambar, statistic, grafik, teks hasil wawancara, dokumen, dan sebagainya yang kemudian dideskripsikan sehingga orang lain atau pembaca mudah memahami.

1.10.2. Lokus dan Fokus Penelitian

Pengertian fokus penelitian yaitu penjelasan tentang indikator dan faktor yang hendak diteliti secara lebih detail. Fokus penelitian juga dapat diartikan sebagai batasan masalah dalam penelitian kualitatif sehingga peneliti tidak terjebak dengan banyaknya data yang ada di lapangan (Sugiyono, 2023). Lokus penelitian adalah lokasi dilakukannya penelitian. Data yang diperlukan didapatkan dari informasi-informasi yang ditemukan di lokasi penelitian (Sujarweni, 2014). Penentuan lokus penelitian dilakukan supaya peneliti menerima data yang lebih akurat.

Lokus penelitian ini berada di Kota Semarang khususnya Kecamatan Semarang Utara sesuai dengan judul yang peneliti buat. Lokasi penelitian ini dipilih karena Kecamatan Semarang Utara memiliki jumlah keluarga penerima manfaat PKH tertinggi di Kota Semarang serta masih terdapat kekurangan dalam implementasinya. Fokus penelitian ini yaitu pada peran pendamping sosial yang terlibat pada Program Keluarga Harapan (PKH).

1.10.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau informan yaitu orang atau kelompok yang dapat dimintai informasi yang sesuai dengan fakta dan berdasarkan dari pendapat mereka pribadi mengenai fokus dari sebuah penelitian yang sedang dilakukan. Terdapat beberapa teknik pengambilan subjek penelitian salah satunya yaitu *purposive sampling*. “*Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu” (Sugiyono, 2023:95).

Subjek pada penelitian ini dipilih secara *purposive sampling*. Informan dipilih dengan memperhatikan kesesuaian dan pemahaman mereka terhadap fokus permasalahan peneliti. Informan yang terpilih merupakan orang yang paham tentang substansi penelitian, sehingga mampu memberikan informasi dan data yang sesuai dengan fokus penelitian. Pada penelitian ini, subjek penelitian antara lain, Koordinator PKH Kota Semarang, Koordinator PKH Kecamatan Semarang Utara, Pendamping PKH Kecamatan Semarang Utara, perangkat daerah tingkat kelurahan dan KPM PKH Kecamatan Semarang Utara

1.10.4. Jenis dan Sumber Data

Saat melakukan penghimpunan data dapat dilakukan dalam beragam setting, sumber, maupun berbagai cara. Dilihat dari sumbernya, penghimpunan data dapat memakai sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yaitu sumber yang dapat memberikan data secara langsung, sedangkan sumber sekunder tidak dapat langsung memberikan data kepada peneliti melainkan melalui orang lain atau dokumen (Sugiyono, 2023). Pada penelitian ini, sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer, yaitu data yang didapatkan langsung dari sumber melalui instrumen yang telah ditetapkan seperti wawancara atau observasi. Data tersebut berasal dari sumber yang kredibel dalam memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang diambil dari sumber yang tidak langsung, seperti catatan atau laporan dari media internet, jurnal ilmiah, dokumen regulasi negara, dan dokumen resmi lainnya yang masih berkaitan dengan fokus penelitian.

1.10.5. Teknik Pengumpulan Data

Dilihat dari caranya atau tekniknya, pengumpulan data dapat dilakukan dengan pengamatan atau observasi, wawancara atau *interview*, kuesioner atau angket, dokumentasi, serta menggabungkan keempatnya. Dalam penelitian kualitatif paling banyak menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam (*in depth interview*), dan dokumentasi (Sugiyono, 2023). Pada penelitian ini menggunakan ketiga teknik pengumpulan data tersebut.

1. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai responden secara langsung untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Wawancara merupakan metode pengumpulan informasi untuk keperluan penelitian melalui tanya jawab secara langsung antara pewawancara dan responden, menggunakan alat yang disebut panduan wawancara (*interview guide*) (Ahmad, 2015). Peneliti akan menggunakan wawancara semi terstruktur, dimana pelaksanaannya lebih

bebas dengan meminta pendapat dan ide-ide responden sehingga dapat menemukan permasalahan yang lebih.

2. Observasi, peneliti melakukan observasi partisipasi pasif yaitu “peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak terlibat dalam kegiatan tersebut” (Sugiyono, 2023:108). Kegiatan tersebut seperti melihat dan mendengar untuk memperoleh gambaran yang realistis tentang satu atau lebih peristiwa.
3. Dokumentasi, yaitu kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penyelidikan terhadap fakta yang tersimpan pada benda-benda tertulis, seperti buku-buku, notulen rapat, dokumen, peraturan-peraturan, dan sebagainya (Ahmad, 2015).

Pada penelitian dengan pendekatan kualitatif, seperti penelitian ini, teknik pengumpulan datanya antara lain, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan bersangkutan dengan peran pendamping sosial dalam Program Keluarga Harapan di Kecamatan Semarang Utara. Tahapan ini sangat bernilai dalam sebuah penelitian. Hal tersebut dikarenakan data yang berkredibilitas tinggi dihasilkan dari teknik pengumpulan data yang benar.

1.10.6. Analisis dan Interpretasi Data

Menurut Noeng Muadjir, analisis data adalah pencarian sistematis pengorganisasian hasil pengumpulan data untuk menambahkan pemahaman peneliti tentang objek yang diteliti dan menyajikannya menjadi temuan kepada orang lain (Ahmad & Muslimah, 2021). Kegiatan analisis bertujuan untuk memberikan makna pada data untuk memecahkan masalah yang diteliti. Terdapat

model analisis interaktif Miles & Huberman, dimana setelah melakukan pengumpulan data, alur analisis dibagi menjadi tiga, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2023).

Reduksi data adalah proses merangkum atau memilih data yang sebelumnya banyak, rumit, dan kompleks yang telah terkumpul dari lapangan menjadi data yang lebih fokus pada hal yang pokok dan penting. Kegiatan tersebut berlangsung selama penelitian kualitatif. Setelah proses pemilihan dan pengurangan data, dilakukan proses penyajian data. Data disajikan tidak hanya dengan teks naratif, tetapi juga dengan bentuk tabel, grafik, matrik dan sebagainya sehingga data lebih terorganisir dan membentuk suatu pola hubungan yang dapat memudahkan untuk dipahami. Alur analisis terakhir adalah menarik kesimpulan, yang berisi pemikiran-pemikiran yang terlintas di benak peneliti saat menulis atau meninjau catatan lapangan. Kesimpulan tidak sekadar muncul selama pengumpulan data, mereka juga perlu divalidasi sebelum sungguh-sungguh dapat diinterpretasikan.

Peneliti memakai model analisis interaktif Miles & Huberman yaitu melakukan reduksi terhadap data dan informasi yang telah diperoleh dari lapangan terkait peran pendamping dalam PKH di Kecamatan Semarang Utara. Setelah itu, data disajikan secara sistematis dalam bentuk naratif yang dilengkapi dengan grafik, tabel, skema, atau matriks. Kemudian, peneliti melakukan penarikan kesimpulan mengenai bagaimana peran pendamping sosial pada PKH di Kecamatan Semarang Utara serta bagaimana faktor pendorong dan penghambat peran pendamping sosial.

1.10.7. Kualitas Data atau Validitas Data

Dalam teknik pengumpulan data terdapat triangulasi yang digunakan untuk mengecek kredibilitas data dari berbagai sumber data, berbagai waktu, dan berbagai teknik pengumpulan data (Sugiyono, 2023). Terdapat tiga macam triangulasi, antara lain triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi teknik.

1. Triangulasi Sumber Data, artinya untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda namun dengan teknik pengumpulan yang sama untuk menguji kredibilitas data (Sugiyono, 2023). Triangulasi dilakukan pada data yang didapatkan dari Dinas Sosial Kota Semarang, Koordinator PKH Kota Semarang, Pendamping PKH Kecamatan Semarang Utara, dan KPM PKH Kecamatan Semarang Utara.
2. Triangulasi Teknik, artinya kredibilitas data diuji dari sumber yang sama dengan teknik yang pengumpulan data yang berbeda . Triangulasi teknik pada penelitian ini diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.